

Pendidikan Antikorupsi Berbasis Project Citizen Pada Mata Pelajaran PPKn

**Jurnal Insan
Peduli
Pendidikan
(JIPENDIK)**

Halaman 8-14

Acep

FTIK, Teknik Informatika, Universitas Indraprasta PGRI,
Jakarta, Indonesia

Abstract

This research aims to describe the implementation of anti-corruption education in citizenship education through citizen project-based activities. This type of research is a descriptive inquiry conducted at SMA Muhammadiyah 1 Depok. As a result, the implementation of anti-corruption education was carried out through studying problems related to corruption, resulting in a presentation panel consisting of 4 parts, namely the problem section, policy alternatives, proposed solutions and action plans. Through these activities, it is hoped that students will acquire several desired attitudes such as honesty, caring, self-help, discipline, responsibility, hard work, humility, courage and fairness.

Research paper

Education

Article Info

Article History:

Received 13/06/2024

Revised 29 06 2024

Accepted 29/06/2024

Available online

30/06/2024



Keywords:

Anti-corruption education, citizenship education, citizen project

JIPENDIK, Vol 2, No. 1, 2024

pp. 08-14

Corresponding Author:

Acep

Email: acephn80@gmail.com

ISSN 3031-7231

(media online)

© The Author(s) 2024



CC BY: This license allows reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the material in any medium or format, so long as attribution is given to the creator. The license allows for commercial use.

Abstrak

Riset ini mempunyai tujuan untuk menggambarkan implikasi pendidikan antikorupsi pada pendidikan kewarganegaraan lewat aktivitas berbasis project masyarakat. Tipe riset ini ialah inkuiri preskriptif yang sudah dilakukan di SMA Muhammadiyah 1 Depok. Hasilnya, implikasi pendidikan antikorupsi dilaksanakan lewat pengkajian persoalan berkaitan korupsi hingga hasilkan panel presentasi yang terbagi dalam 4 sisi yakni sisi permasalahan, alternative peraturan, saran jalan keluar, dan gagasan tindakan. Lewat aktivitas itu diharap pelajar akan mendapat sejumlah sikap yang diharapkan

Kata kunci: Pendidikan Antikorupsi, Pendidikan Kewarganegaraan, Project Citizen

Pendahuluan

Permasalahan korupsi adalah permasalahan signifikan yang terjadi di Indonesia. Korupsi berkembang secara cepat dan semakin makin tambah luas di beberapa faktor kehidupan warga. Pasti dibutuhkan usaha yang efisien saat menuntaskan korupsi di Indonesia. Usaha pengenalan berkenaan budaya antikorupsi seharusnya dilakukan sejak awal kali. Akan tetapi usaha itu pasti belum jadi agunan saat meningkatkan muatan materi pendidikan antikorupsi pada beberapa sekolah itu. Bentuk usaha pengendalian korupsi pasti jadi pengkajian yang bagus sekali di dunia sekarang ini. Oleh karena itu memerlukan taktik dan usaha optimal oleh pemerintahan untuk meminimalisir hal tersebut. Pemerintahan melihat instansi pendidikan menjadi satu diantara instansi yang efisien.

Dengan pengetahuan antikorupsi sejak awal diharap sanggup cetak calon pimpinan bangsa yang memiliki jiwa antikorupsi di Indonesia. Oleh karena itu benar-benar dibutuhkan usaha yang vital dan struktural saat mengajari hingga betul-betul tercipta beberapa peserta didik yang berwatak berdasar beberapa nilai antikorupsi.

Pendidikan antikorupsi adalah usaha yang sudah dilakukan pemerintahan saat memberikan sikap antikorupsi pada peserta didik di lingkungan sekolah. Korupsi sendiri adalah tidak perlakuan yang bikin rugi banyak orang dengan memanfaatkan kedudukan untuk mendapat keuntungan secara individu. Korupsi dilaksanakan beberapa cara yang tidak sesuai dengan ketentuan, misalnya: penyuapan, pemerasan dan penipuan mempunyai potensi terjadi pada bidang pemerintah yang hendak jadi penyakit yang menghancurkan semua aturan kehidupan (Hamilton-Hart, 2001). Pada intinya pendidikan anti korupsi bisa disimpulkan sebagai salah satunya program pendidikan yang menerangkan dan mengatasi beragam korupsi yang terjadi di kelompok masyarakat dengan usaha penanaman sedini mungkin jiwa antikorupsi dengan tujuan untuk membuat dan tingkatkan perhatian masyarakat negara pada bahaya dan akibatnya karena perlakuan korupsi. Pendidikan antikorupsi mempunyai tiga tujuan, pertama, membuat pengetahuan dan pengetahuan bentuk korupsi dan aspek- aspeknya. Ke-2 , mengganti pemahaman dan sikap pada korupsi. Ke-3 , membuat ketrampilan dan kemahiran diperuntukkan untuk menantang korupsi (Hakim, 2012).

Sebagai perbedaan, peningkatan pendidikan antikorupsi di Lithuania dilaksanakan dengan struktural semenjak tahun 2015 dengan memberi pengetahuan pada peserta didik untuk bisa membandingkan di antara kejahatan korupsi dengan kejahatan lain, memberi argument yang rasional dan logis kenapa korupsi dipandang seperti sesuatu kejahatan, dan memperlihatkan beberapa cara yang dapat dilakukan saat kurangi berlangsungnya tindak pidana korupsi. Ada

banyak hal yang penting dikembangkan pada proses pendidikan antikorupsi di kelas yaitu pengetahuan mengenai korupsi, peningkatan sikap antikorupsi, peralihan sikap antikorupsi, pendidikan kepribadian, dan peningkatan watak antikorupsi (Ministry of Education and Science of the Republic of Lithuania, 2006, p. 22).

Pemerintahan sebaiknya jamin dan menjaga pendidikan antikorupsi supaya tujuan dan sasaran awalnya dalam implikasi pendidikan antikorupsi betul-betul dapat dimengerti dan diolah baik oleh guru-guru pengampu mata pelajaran yang terkait dengan pendidikan antikorupsi. Bukan hanya guru saja tetapi peranan instansi sekolah dalam penerapan dan pengendalian mekanisme pendidikan harus juga ikut mengambil sisi. Tanpa ada bekerja sama yang bagus di antara guru dengan instansi sekolah yaitu kepala sekolah sebagai pengambil peraturan langsung, tidak mungkin beberapa program pendidikan antikorupsi yang dikomunikasikan pemerintahan semenjak tahun 2009 sampai saat ini dapat terwujud.

PPKn adalah mata pelajaran yang berisi beberapa nilai watak berkebangsaan. PPKn adalah pendidikan yang berperan untuk membuat kesadaran masyarakat negara saat jalankan hak dan kewajiban sebagai masyarakat negara dalam usaha membuat jati diri pada masyarakat negara untuk sesuatu bangsa. Evaluasi PPKn harus bertopang pada kekuatan dasar kewarganegaraan (civic competence) untuk semuanya tingkatan. Karena itu supaya evaluasi efisien dan sanggup memperlengkapi pelajar dengan pengetahuan dan capai kekuatan dasar kewarganegaraan, karena itu saat meningkatkan aktivitas evaluasi perlu memerhatikan banyak hal. Pertama, Aktivitas Evaluasi PPKn diatur untuk memberi dana untuk beberapa pengajar (guru), supaya bisa melakukan proses evaluasi secara professional. Ke-2, aktivitas evaluasi PPKn berisi serangkaian aktivitas yang perlu dilaksanakan oleh peserta didik dengan berurut untuk capai kapabilitas dasar. Ke-3, penetapan posisi aktivitas evaluasi PPKn harus sesuai hierarki ide materi evaluasi. Ke-4, perumusan pengakuan pada aktivitas evaluasi PPKn minimal memiliki kandungan dua elemen yang menggambarkan pengendalian pengalaman belajar peserta didik.

PPKn mempunyai peranan penting pada usaha tumbuhkan watak angkatan muda yang berpikiran krisis mengenai desas-desus global agar dapat mengeksploitasi, meningkatkan dan ekspresikan beberapa nilai dan opini mereka sendiri. Pasti ini memperlihatkan jika pendidikan harus betul-betul sanggup untuk meningkatkan karakter masyarakat negara yang berdasar watak sesuatu negara. Untuk tumbuhkan karakter masyarakat negara pada proses evaluasi PPKn pasti diperlukan Pengembangan. Pengembangan evaluasi PPKn bisa dilaksanakan implementasi pendekatan evaluasi PKn dari pendekatan yang fokus pada isi (konten based curriculum) ke lebih mengutamakan dalam proses (process based curriculum). Ide ini ditujukan supaya lewat PPKn bisa tercipta masyarakat negara lebih berdikari saat pahami dan cari jalan keluar pada permasalahan yang ditemui dan sanggup ambil keputusan-keputusan yang terbaik untuk dirinya, lingkungan dan penduduknya. Kurtilas menerangkan bawah usaha proses evaluasi yang dikembangkan dalam tiap proses evaluasi sebaiknya fokus pada implementasi beberapa nilai watak berkebangsaan secara berdasarkan beberapa nilai dasar negara Pancasila. Peningkatan faktor sosial, pengetahuan dan ketrampilan sebaiknya jadi fokus utama khusus dengan keinginan tujuan evaluasi yang dikatakan betul-betul dapat terwujud. Pendekatan evaluasi saintifik pada Kurikulum 2013 pasti jadi usaha yang efisien saat meningkatkan faktor pengetahuan dan ketrampilan peserta didik. Evaluasi saintifik adalah evaluasi yang adopsi langkah-cara periset saat membuat pengetahuan lewat sistem ilmiah. Evaluasi saintifik tidak sekedar mendapat kekuatan faktor pengetahuan, ketrampilan dan sikap n. Peranan guru dalam mode evaluasi ini sebagai pelatih dan fasilitator yang memberikan pada peserta didik mengenai sumber-sumber informasi yang baru, menolong melangsungkan kontak-kontak langsung dan memperlengkapi beberapa peserta didik dengan aktif dan kritis. Berdasar document CCE

proses evaluasi proyek citizen dikembangkan pada suatu scenario dan rambu-rambu evaluasi yang meliputi enam cara seperti berikut:

1. Mengidentifikasi permasalahan peraturan public yang terdapat dalam warga; Dalam langkah ini kelas difasilitasi agar bisa mengenali beragam permasalahan yang berada di lingkungan warga dengan lewat penilaian, interviu. study dokumentasi yang sudah dilakukan dengan barisan.
2. Memilih permasalahan sebagai konsentrasi pengkajian kelas. Dalam langkah ini, kelas difasilitasi untuk membahas beragam permasalahan itu dan pilih satu permasalahan yang paling pantas untuk terpecahkan.
3. Mengumpulkan informasi berkaitan permasalahan sebagai konsentrasi pengkajian kelas;
4. Mengembangkan sesuatu portofolio kelas. Dalam langkah ini, kelas meningkatkan portofolio berbentuk himpunan kerja hasil barisan dalam rencana perpecahan permasalahan itu dan menyuguhkannya dengan keseluruhnya berbentuk panel pameran yang bisa disaksikan bersama, yang menggambarkan sama-sama keterikatan permasalahan, alternative peraturan, support atas alternative peraturan, dan gagasan perlakuan untuk melakukan peraturan itu.
5. Menyajikan portofolio kelas pada suatu replikasi dengar pendapat; dan Dalam langkah ini, keseluruhnya portofolio yang sudah dikembangkan selanjutnya dihadirkan dan ditampilkan ke masyarakat sekolah dan warga (Winataputra dan Budimansyah, 2007, pp. 1-2).

Metodologi Penelitian

Riset ini adalah riset preskriptif kualitatif. Riset ini dilaksanakan di SMA Muhammadiyah 1 Depok pada kelas X. Sumber data dalam riset ini terbagi dalam kepala sekolah, waki kepala sekolah sektor kurikulum, guru mata pelajaran PPKn dan peserta didik. Tehnik pengumpulan data dalam riset ini yakni lewat pengamatan, interviu dan dokumentasi. Tehnik analitis data dalam riset ini dilaksanakan lewat tiga tahapan, selanjutnya diuraikan dengan preskriptif. Tahapan seterusnya yakni proses membuat rangkuman sesuai tujuan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Proses evaluasi PPKn pasti perlu dilaksanakan dengan berkesinambungan dan struktural. Skema evaluasi yang struktural dan terarah akan meningkatkan kapabilitas keilmuan pada siswa. Proses alih bentuk beberapa nilai keilmuan pada peserta didik pasti jadi parameter tercapainya tujuan evaluasi yang hendak diraih. Implikasi Pendidikan antikorupsi pada pelajaran PPKn memakai mode evaluasi proyek citizen dapat dilaksanakan lewat tahapan-tahapan.

Muatan materi yang dikembangkan pada proses evaluasi PPKn terdiri mekanisme hukum dan peradilan nasional yang diberikan pada materi PPKn kelas X. Lewat materi ini bisa disisipkan materi mengenai pemahaman tindak pidana korupsi dengan tujuan peserta didik sanggup pahami makna kata dan pengertian korupsi secara benar dan tepat, peserta didik sanggup menerangkan sejarah korupsi dan pembasmian korupsi di Indonesia secara betul dan peserta didik sanggup menerangkan beberapa bentuk korupsi.

Dan materi seterusnya yang penting di berikan pada peserta didik terbagi dalam materi yang terkait dengan usaha dan ikut serta pembasmian korupsi dengan tujuan evaluasi supaya peserta didik sanggup menerangkan beragam usaha pembasmian korupsi, peserta didik sanggup

menerangkan ikut serta dalam usaha pembasmian korupsi ke kehidupan satu hari peserta didik sanggup pahami nilai antikorupsi.

Lewat evaluasi pendidikan antikorupsi pada peserta didik akan memberi kontributor lebih saat meningkatkan beberapa nilai atau sikap antikorupsi pada peserta didik. Muatan materi evaluasi pendidikan antikorupsi pada evaluasi PPKn dilaksanakan lewat banyak hal satu diantaranya mempersiapkan piranti evaluasi, mempersiapkan materi evaluasi yang terbagi dalam pertama, pemahaman tindak pidana korupsi s/d ke-2, usaha dan ikut serta dalam pembasmian korupsi.

Ke-2 materi ini dikatakan pada tatap muka pertama dengan durasi waktu 2x 45 menit. Ini mempunyai tujuan supaya beberapa peserta didik dapat menyerap beragam permasalahan dan pengetahuan fundamental mengenai korupsi pada umumnya, hingga dalam tatap muka ke-2 kelak peserta didik akan diberikan beragam permasalahan mengenai korupsi agar dapat dituntaskan lewat mode evaluasi proyek citizen.

Pada intinya proses pengimplementasian beberapa materi pendidikan antikorupsi pada mata pelajaran PPKn telah diperkembangkan dengan umum dalam tiap evaluasi yang sudah dilakukan. Ini ingat jika salah satunya usaha yang penting dilaksanakan instansi sekolah terutama guru mapel PPKn yaitu seperti mana beberapa nilai ide dasar, dapat diperkembangkan dalam banyak hal baik peningkatan kurikulum evaluasi PPKn yang berisi materi pendidikan antikorupsi atau proses pembelajaran yang sudah dilakukan oleh guru hingga masing-masing elemen dalam evaluasi dapat digabungkan dengan lengkap dalam piranti evaluasi. Tujuan akhirnya proses evaluasi ini yaitu mempersiapkan beberapa angkatan muda yang memiliki jiwa global yaitu warganegara global yang hendak berpikir dengan luas dalam pengendalian korupsi. kewarganegaraan global akan tumbuhkan watak angkatan muda yang berpikir krisis mengenai desas-desus global agar dapat mengeksplorasi, meningkatkan dan ekspresikan nilai-nilai dan opini mereka sendiri (Zahabioun, Yousefy, Yarmohamma dian, dan Keshtiaray, 2013, p. 199).

Implikasi Pendidikan Antikorupsi pada mapel PPKn Berbasiskan Proyek Citizen adalah mode evaluasi yang berbasiskan pada permasalahan untuk meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan karakter kewarganegaraan yang menggerakkan ada tingkat keterlibatan masyarakat negara dalam mekanisme pemerintah.

Ada tahapan-tahapan pada proses evaluasi memakai proyek citizen sesudah peserta didik pahami materi pada tatap muka ke-2 peserta didik ditujukan untuk dipisah jadi beberapa kelompok kecil, terbagi dalam 4 pelajar. Masing-masing barisan kecil diberi pekerjaan untuk cari informasi mengenai permasalahan yang terdapat disekitaran. Selanjutnya Pelajar lakukan analisis permasalahan di kehidupan sehari-hari lewat dialog dalam kelas, menanyakan/interviu ke orangtua/keluarga, membaca koran baik bikin atau online, dengarkan informasi atau melihat TV, cari sumber informasi lewat internet. Dalam masalah ini riset ambil contoh topik besar mengenai minimnya transparan ongkos sekolah yang diambil secara demokrasi dari beragam permasalahan yang terpenting untuk dituntaskan.

Kemudian peserta didik dipisah jadi lima barisan. Ke-5 barisan itu bisa diterangkan seperti berikut. Barisan 1 bekerja menerangkan permasalahan yang hendak diulas, barisan 2 yang menilai peraturan alternative, barisan 3 yang meningkatkan jalan keluar sebagai peraturan kelas, barisan 4 meningkatkan gagasan perlakuan. Barisan ke-5 bertanggungjawab sisi dokumentasi.

Kesimpulan

Berdasar riset yang dikembangkan oleh periset, hasilkan ringkasan seperti berikut:

1. Implementasi materi pendidikan antikorupsi pada mata pelajaran PPKn biasa dilaksanakan lewat sejumlah tahapan. Mengembangkan kurikulum evaluasi PPKn ini dapat disisipkan lewat materi mekanisme hukum dan peradilan nasional. Pada bab ini akan disisipkan pendidikan antikorupsi yaitu materi mengenai pemahaman tindak pidana korupsi dan materi usaha dan ikut serta pembasmian korupsi. proses evaluasi Pendidikan antikorupsi pada mata pelajaran PPKn dapat dilaksanakan mempersiapkan piranti evaluasi yang terbagi dalam media, mode proyek citizen dan bahan rekomendasi lain baik, internet studi lapangan atau sumber pengkajian lain. Pada proses evaluasi dilaksanakan sepanjang 2x tatap muka untuk tatap muka pertama mengulas mengenai materi dasar pendidikan antikorupsi dan tatap muka ke-2 telah praktek evaluasi
2. Implementasi pendidikan antikorupsi pada mata pelajaran PPKn berbasis proyek citizen bisa menjadi dasar keilmuan yang dapat merealisasikan angkatan yang mempunyai sikap antikorupsi yang lebih tinggi krisis saat menyingkapi beragam kasus korupsi. Implementasi itu bisa dilaksanakan lewat banyak hal 1) Implementasi proses evaluasi memakai mode proyek citizen peserta didik ditujukan untuk membahas beragam permasalahan mengenai korupsi. Dari tiap-tiap permasalahan diambil yang terpenting agar selekasnya dituntaskan. Sesudah diketemukan permasalahan intinya baru dibuat barisan besar yang terbagi dalam empat elemen barisan 1-Mmenjelaskan permasalahan yang akan diulas, barisan 2-Mengevaluasi peraturan alternative, barisan 3-Mengembangkan jalan keluar sebagai peraturan kelas, barisan 4-Mengembangkan gagasan perlakuan. Lewat proses ini maka ada jalan keluar dari permasalahan yang diulas dan bisa menjadi referensi untuk dituntaskan bentuk panel presentasi proyek citizen.

Daftar Pustaka

- Budimansyah, D. (2008). Revitalisasi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan melalui praktik belajar kewarganegaraan (project citizen). *Civicus*, 1(2), 179–189.
- Cogan, J., & Derricott, R. (Eds.). (1998). *Citizenship for the 21st century: an international perspective on education*. London: Kogan Page.
- Hakim, L. (2012). Model integrasi pendidikan antikorupsi dalam kurikulum pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 10(2), 141–156.
- Hamilton-Hart, N. (2001). Anri-corruption strategies in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 37(1), 65–82.
- Maftuh, B. (2008). Internalisasi nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *Educationist*, II (2), 134–143. Retrieved from http://103.23.244.11/Direktori/JURNAL/EDUCATIONIST/Vol_II_No_2Juli_2008/7_Bunyamin_Maftuh_rev.pdf
- Ministry of Education and Science of the Republic of Lithuania. (2006). *Anticorruption education at school. methodical material for general and higher education school*. Vilnius: Garnelis Publishing, Klaipėdos St. 6, LT-01117.
- Sax, G. (1997). *Principles of educational and psychological measurement and evaluation*. Washinton: Wadsworth publishing company.

Sutrisno. (2016). Peran ideologi Pancasila dalam perkembangan konstitusi dan sistem hukum di Indonesia. *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(1), 41–49.

Wahab, A. A., & Sapriya. (2011). *Teori dan landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Alfabeta.